

Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (studi Kasus Pada Bpr Di Provinsi Jawa Barat Periode 2017)

Euodia Pracinthea

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Djuminah

Universitas Sebelas Maret Surakarta

djuminah80@gmail.com

***Abstract:** BPR's financial performance has been continuously improved, one of which is by intensifying GCG (good corporate governance) implementation. GCG is considered capable of being a means for BPR to maintain the continuity of BPR operations and to minimize the level of liquidation phenomenon continues today. The purpose of this study is to know the impact or the influence of GCG structure on the BPR's performance as measured by the ROA. The secondary data is used,. The results of this study is BPR governance's structure that's proxied by the number of directors has a positive significant impact on ROA, but managerial ownership and institutional ownership and the number of commissioners do not have a significant effect.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Financial Performance, BPR*

PENDAHULUAN

Peran bank dibidang ekonomi sangat penting yaitu dalam membantu mendorong pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan taraf hidup rakyat salah satunya melalui penyaluran dana dalam bentuk kredit. Di Indonesia, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan salah satu jenis banknya. Peranan BPR didalam menunjang perekonomian negara cukup besar yaitu melalui pemberian kredit pada UMK yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pembiayaan UMK sehingga memajukan UMK yang pada akhirnya akan mendongkrak perkenonomian negara. Maka dari itu pemerintah melalui Peraturan oleh Bank Indonesia yang diterbitkan yaitu No: 8/26/PBI/2006 menekankan agar BPR harus diperkuat demi menciptakan industri yang sehat, produktif serta memiliki daya saing agar pemberian pelayanan kepada masyarakat terkhususnya untuk UMK dapat meningkat. .

Tingginya peranan BPR menjadi alasan utama pentingnya menjaga kualitas kinerja BPR, maka BPR dihimbau untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, pada realitanya terdapat sejumlah kasus likuidasi BPR diberbagai wilayah di Indonesia yang mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan tingkat kinerja BPR. Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa sejak tahun 2005 hingga semester pertama 2018 terdapat 89 bank yang dilikuidasi di seluruh Indonesia, dan provinsi dengan likuidasi BPR terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat. Selama periode 2005-2018, tercatat ada 32 BPR di Jawa Barat yang diberhentikan kegiatan operasionalnya. OJK dan Perbarindo menyatakan, penyebab kebanyakan BPR diberhentikan/dicabut izin usahanya adalah karena tindakan fraud yang dilakukan para pengurus BPR. Terjadinya tindakan fraud ini dikarenakan BPR tidak mampu melaksanakan tata kelolanya dengan baik. Salah satu hal yang menjadi indikasi BPR yang dilikuidasi yaitu bahwa BPR tersebut mengalami penurunan yang kondisi keuangan yang sangat signifikan pada asetnya. Diakses pada 2 Januari 2019, dari <http://infobanknews.com/dibalik/>.

Adanya fenomena likuidasi semakin memantapkan pemerintah untuk mengencakan penerapan GCG bagi BPR. Tak hanya dinilai mampu menghindarkan dari masalah-masalah yang mengancam kelangsungan usaha BPR, penerapan GCG juga dinilai mampu melindungi kepentingan para pemangku (stakeholder) serta sebagai bukti kepatuhan terhadap UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bukti kepatuhan pada etika-etika umum yang ada didalam industri perbankan, dengan tujuan yang tak lain untuk mewujudkan sistem perbankan yang baik dan sistem yang sehat. Jika tata kelola yang baik ini terus diterapkan, maka akan dapat memberi pengaruh terhadap kinerja BPR serta mampu mengurangi besarnya risiko yang diakibatkan oleh pengelolaan yang memiliki kecenderungan akan menguntungkan salah satu pihak.

Penelitian-penelitian yang memiliki tujuan guna mengetahui pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan pada industri bank telah banyak dilakukan. Didalam penelitian Muktiyanto (2011) yang meneliti mengenai pengaruh interdependensi dari mekanisme CG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kebijakan utang, kebijakan dividen, konsentrasi pasar, dan pangsa pasar terhadap kinerja perbankan, hasilnya menunjukkan adanya interdependensi antar mekanisme tersebut.

Penelitian Andriyan dan Supatmi (2010) yang bertujuan meneliti mengenai pengaruh mekanisme CG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, proporsi outside director, dan BOD terhadap kinerja keuangan pada BPR di Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh simultan mekanisme CG terhadap rasio NPL, rasio KPMM, serta rasio ROA. Hasil penelitian secara parsial, terbukti bahwa adanya pengaruh negatif signifikan kepemilikan manajerial dan proporsi outside directors terhadap rasio NPL dan rasio ROA, sedangkan variabel BOD menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap rasio LDR.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada analisis mengenai pengaruh struktur good corporate governance terhadap kinerja keuangan BPR yang diukur atau diproksikan dengan rasio ROA. ROA adalah salah satu rasio penilaian rentabilitas yaitu merupakan penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap kondisi serta kemampuan BPR dalam upayanya menghasilkan keuntungan untuk mendukung kegiatan operasional dan kegiatan permodalan yang sesuai dengan SE BI No.9/29/DPbS 2007. Penilaian rentabilitas ini digunakan sebagai salah satu dari beberapa faktor penilaian yang mengukur tingkat kesehatan BPR, tingkat kesehatan tersebut menjadi indikator yang dapat mengukur baik tidaknya kinerja BPR. Pentingnya penelitian ini dilaksanakan yaitu guna membuktikan pengaruh dari struktur GCG terhadap kinerja keuangan BPR di daerah Jawa Barat karena penerapan GCG berpotensi mempengaruhi tingkat kinerja keuangan BPR sehingga BPR mampu meningkatkan peranan BPR sebagai lembaga intermediasi serta memperkecil tingkat likuidasi BPR.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi berbagai manfaat yaitu diantaranya mampu menjadi penambah wawasan dan sebagai referensi empiris tentang pengaruh struktur GCG terhadap kinerja keuangan BPR. Peneliti juga mengharapab hasil penelitian ini mampu memberi manfaat praktis bagi BPR, agar BPR semakin menyadari akan pentingnya diterapkannya tata kelola yang baik guna meningkatkan kinerjanya.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep yang dijelaskan oleh teori agensi merupakan penjelasan tentang hubungan antara pihak yang ada pada suatu perusahaan yaitu prinsipal dan agen. Agen dipekerjakan oleh prinsipal yaitu untuk memenuhi kepentingan dari prinsipal. Prinsipal juga mendelegasikan otoritas dalam pengambilan keputusan kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2005). Prinsipal mengontrak pihak agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu, dan prinsipal mengontrak pihak agen juga agar agen bertanggung jawab untuk memenuhi dan memaksimalkan kemakmuran prinsipal. Namun pada kenyataannya, agen atau pihak manajemen tidak selalu bekerja demi kemakmuran prinsipal ketika kendali perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Sebab pada dasarnya baik prinsipal ataupun agen memiliki tujuan yang tidak sama. Sebagai pihak pengelola perusahaan, agen lebih memiliki tujuan dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang diterima. Ketika masing-masing stakeholder bertindak untuk kepentingan pribadi, maka akan timbul konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan dapat memberi dampak pada hasil kinerja karena para agen bertindak oportunistik.

Jensen dan Meckling (1976) mengembangkan sebuah teori komprehensif dari perusahaan di bawah pengaturan agensi yang menunjukkan bahwa sebagai pemegang atau pemilik saham prinsipal memiliki keyakinan bahwa pihak agen sebagai pengelola perusahaan akan mengambil keputusan dengan baik dan optimal hanya jika agen diberikan insentif yang sesuai dan hanya jika agen dimonitor. Namun terdapat permasalahan dalam melakukan kontrol dan monitor yaitu diantara prinsipal dan agen terdapat asimetri informasi. Pada konsep teori agensi diasumsikan bahwa pihak agen sebagai pengelola perusahaan sudah semestinya memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal yang hanya sebagai pemilik/pemegang saham.

Hoetker dan Mellewig (2009) mengatakan bahwa struktur tata kelola merupakan sebuah hubungan yang membantu untuk meminimalkan risiko akibat tindakan oportunistik. Hal ini diukung pula oleh teori agensi yang konsepnya meyakini bahwa adanya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan suatu upaya perusahaan yang rasional yang digunakan untuk menjalankan mekanisme kontrol, walaupun struktur organisasi bersifat kompleks namun keberadaannya mampu mewujudkan sistem yang dinilai efisien dalam hal mengatur kerja sama antara kedua pihak (prinsipal dan agen) yang berhubungan (Niki 2016:38). Struktur organisasi yang baik diharapkan mampu meminimalisir masalah keagenan dalam suatu lingkup organisasi. Struktur organisasi yang baik ini sebagai salah satu bagian dari corporate governance.

Konsep dan Struktur Good Corporate Governance

Tata kelola yang baik diterapkan guna memperbaiki kinerja sehingga dapat memperkecil praktik kinerja yang buruk yang dapat menyebabkan krisis hingga likuidasi. Untuk menguatkan pentingnya implementasi GCG, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menetapkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia pada Januari 2004. Pedoman ini ditujukan guna memastikan terwujudnya sistem perbankan yang sehat.

Konsep corporate governance sudah dikenal dari abad 17 oleh Adam Smith yang dianggap oleh para ahli bidang CG bahwa Adam Smith merupakan filosof pertama yang menjadi peletak dasar formalisasi konsep CG (Niki 2016:23). Sampai sekarang, berbagai pengertian mengenai corporate governancepun makin banyak dan dikemukakan oleh para ahli. The OECD report (1999) memberikan pengertian corporate governance merupakan proses di mana perusahaan diarahkan (directed) dan dikendalikan (controlled). Definisi ini memberikan penekanan pada unsur arahan dan pengendalian didalam rangkaian proses CG. Dalam definisi tersebut pula ditekankan mengenai aspek utama CG yaitu conformance (kepatuhan terhadap aturan) serta performance (kinerja). Aspek conformance berhubungan dengan pengendalian

sedangkan aspek performance berhubungan dengan pengarahan. Didalam organisasi, fungsi pengendalian salah satunya dilakukan oleh mekanisme internal yaitu dewan komisaris.

Telah disebutkan pada penjelasan teori agensi sebelumnya bahwa permasalahan keagenan menjadi pemicu pentingnya tata kelola yang baik bagi sebuah organisasi, tak terkecuali pada industri perbankan. Keberadaan GCG menjadi kekuatan penyeimbang antara stakeholder terhadap organisasi, GCG sebagai penyeimbang agar pihak yang berkuasa tidak berlebihan menggunakan kekuasaannya dan supaya pihak tersebut tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain. Hal tersebut dikuatkan dengan definisi corporate governance yang diberikan oleh Clarke (2004) "tata kelola perusahaan adalah tentang cara suatu entitas perusahaan diatur dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan atas entitas perusahaan". Dalam sebuah perusahaan, ketika tata kelola yang baik diterapkan, maka mampu mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan dan juga dapat memberi kepastian bahwa pihak-pihak berkepentingan, dalam hal ini prinsipal dan agen agar tidak bertindak diluar hak dan kewajiban yang dimiliki. Ditekankan lagi oleh pernyataan Tricker (2009) bahwa untuk mendukung efektifnya fungsi corporate governance dalam suatu korporasi struktur GCG merupakan hal yang amat penting.

Bacelius Ruru (2002) mengatakan bahwa kunci penting yang menjadi penentu kesuksesan implementasi GCG yaitu efektifitas peran dan fungsi organ utama korporasi. Oleh sebab itu, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, suatu keharusan bahwa struktur organ utama suatu perusahaan harus dibangun sebaik mungkin sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan serta didasari atas prinsip bahwa setiap organ/pemangku kepentingan memiliki interdependensi ketika melaksanakan tugas dan juga tanggungjawabnya semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan. Berbagai macam penjelasan telah menegaskan bahwa struktur organisasi dalam perspektif CG diperlukan untuk memberikan kejelasan tentang baik fungsi, hak, maupun kewajiban serta tanggung jawab diantara pihak berkepentingan (prinsipal dan agen) yang mencakup proses kontrol serta menciptakan keseimbangan antar pihak.

Kinerja Keuangan

Sebuah keadaan, hasil, maupun capaian prestasi perusahaan dalam kurun waktu atau dalam periode tertentu., merupakan definisi kinerja keuangan, Helfert (2008). Lebih spesifik mengenai kinerja dalam konteks moneter atau yang biasa disebut sebagai kinerja keuangan, merupakan tindakan melaksanakan berbagai kegiatan/aktivitas keuangan. Kinerja keuangan mengacu pada sejauh mana suatu tujuan finansial sedang ataupun telah dicapai. Kinerja keuangan dalam hal ini

merupakan suatu proses untuk bagaimana mengukur hasil dari kebijakan-kebijakan serta operasional sebuah perusahaan dalam hal moneter. Kinerja keuangan pun juga digunakan untuk mengukur seberapa tingkat kesehatan finansial didalam suatu perusahaan secara menyeluruh dalam kurun periode tertentu. Selain itu, untuk membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain pada industri yang sama, serta sebagai pembandingan pada industri/sektor yang dilihat secara agregat kinerja keuangan perusahaan tersebut yang digunakan sebagai bandingan.

Didalam industri perbankan, gambaran mengenai bagaimanakah kondisi keuangan bank dalam suatu periode, yang mencakup aspek-aspek penghimpunan dana maupun aspek penyalurannya yang diukur menggunakan berbagai macam indikator keuangan antara lain yaitu indikator kecukupan modal, profitabilitas serta likuiditas, digambarkan melalui kinerja keuangan (Minan 2008:16). Kinerja keuangan bank menjadi aspek yang penting yang menjadi salah satu indikator kesehatan bank. Sebagai pengawas bank, BI (Bank Indonesia) menetapkan berbagai peraturan mengenai kinerja keuangan perbankan. UU RI No. 7 Tahun 1992 didalamnya terdapat penjelasan bahwa Bank Indonesia memiliki hak yaitu untuk menetapkan aturan mengenai kesehatan bank dengan selalu memperhatikan berbagai aspek keuangan yang berkaitan dengan usaha perbankan yaitu diantaranya aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, serta aspek solvabilitas.

Rasio yang bersumber dari laporan keuangan perbankan dapat digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan merupakan cara untuk menilai kinerja keuangan didalam suatu perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dalam penelitian ini, salah satu faktor penilaian kesehatan BPR yaitu rentabilitas digunakan untuk menilai kinerja keuangan BPR. Rasio ROA yang merupakan salah satu faktor rentabilitas inilah yang menjadi ukuran kinerja keuangan. Manajemen perusahaan menggunakan rasio ini untuk mengukur efektivitas dari operasional perusahaan secara keseluruhan. Pernyataan yang juga sejalan yaitu pernyataan dari Horne dan Wachowicz (2005:235) bahwa ROA mampu digunakan sebagai pengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivasinya untuk menghasilkan laba; pengukur efektivitas daya dengan modal yang diinvestasikannya untuk menghasilkan laba. Keefektivan operasi perusahaan ini nantinya akan mempengaruhi baik buruknya kinerja perusahaan tersebut.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan BPR di Jawa Barat

Aspek dari tata kelola yang baik dari segi struktur kepemilikan saham, salah satunya yaitu kepemilikan saham oleh manajemen atau kepemilikan manajerial. Sebagian atau keseluruhan saham pada sebuah perusahaan dimiliki satu atau lebih

manajemen pada perusahaan tersebut. Jika manajemen perusahaan yang sebagai agen diberi kesempatan untuk juga menjadi pemilik saham (prinsipal), maka penyetaraan kepentingan agen dan prinsipal dianggap akan lebih mudah. Keterlibatan dalam kepemilikan saham tersebut dinilai mampu memberi dorongan atau motivasi terhadap pihak manajemen untuk berkinerja dengan hati-hati dalam mengelola perusahaan, karena konsekuensi dan risiko dari setiap tindakan, kinerja, maupun keputusan yang diambil pihak manajemen akan berimbas atau berdampak terhadap diri mereka sendiri karena turut menjadi bagian dari pemilik saham. Keterlibatan kepemilikan saham itu juga mampu memotivasi pihak manajemen untuk menaikkan kinerjanya dari segi peningkatan laba menggunakan aset perusahaan secara efektif dan efisien.

Penjelasan sebelumnya juga didukung oleh Jensen dalam Faisal (2005) yang menerangkan mengenai hipotesis pemusatan kepentingan, bahwasanya kepemilikan saham oleh manajemen mampu menyatukan kepentingan diantara manajemen sebagai agen dan prinsipal sebagai pemilik, sehingga konflik agensi dianggap akan surut atau bahkan hilang. Dalam hipotesis ini memandang bahwa kinerja perusahaan akan makin meningkat jika presentase saham milik manajemen naik. Hasil penelitian oleh Andriyan dan Supatmi (2010) juga mendukung pernyataan Jensen, karena hasil penelitiannya terbukti bahwa ada pengaruh positif signifikan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan (BPR). Kumai dkk (2014) serta Karmozdi dan Hadi (2013) pun melakukan penelitian dengan hasil serupa bahwa ada pengaruh positif signifikan kepemilikan manajerial terhadap Return on Asset. Dari berbagai penjelasan dan uraian diatas, maka berikut hipotesis yang diajukan.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan BPR di Jawa Barat

Sebuah institusi dalam memantau perkembangan investasi yang ditanamnya, melakukan pemantauan tersebut secara profesional. Pemantauan yang profesional ini membuat tingkat pengendalian atau monitoring institusi terhadap tindakan manajemen dalam perusahaan dimana institusi menanamkan investasinya dinilai sangat tinggi. Adanya pengendalian oleh institusi meminimalisir potensi kecurangan yang dicurigai akan mampu dilakukan oleh pihak manajemen. Penjelasan tersebut menekankan bahwasanya perilaku oportunistik sebagai akibat dari konflik agensi dapat ditekan, atau bisa diartikan investor institusional mengambil peran pemantauan yang lebih efektif dalam arena tata kelola perusahaan (Chaganti dan Damanpour, 1991). Pemantauan yang efektif ini akan memacu manajer agar manajer semakin

meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan, serta saat manajer membuat keputusan akan semakin terpacu untuk lebih hati-hati. Keputusan tersebut nantinya berdampak pula pada profitabilitas perusahaan yang salah satunya pengukurannya menggunakan rasio ROA seperti pada penelitian ini.

Studi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan sudah banyak diteliti. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan Del Guercio dan Hawkins (1999), Nesbitt (1994), dan Smith (1996) yang pada hasil penelitiannya telah menemukan adanya hubungan positif signifikan secara statistik antara keberadaan investor institusional dan kinerja perusahaan. Avelia dan Tarigan (2017) juga menegaskan pada hasil penelitiannya bahwa kepemilikan oleh institusi mampu memantau manajemen dalam mengambil keputusan sehingga financial performance menjadi lebih baik yang dalam penelitiannya menggunakan ROA sebagai ukuran. Dari berbagai penjelasan dan uraian diatas, maka berikut hipotesis yang diajukan.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan BPR di Jawa Barat.

Wardhani (2007) meyakini bahwa peran dari dewan komisaris amat penting dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Pfefer (1973) dalam Young et al. (2001) memberi penilaian akan fungsi dewan komisaris. Perspektif yang dikemukakannya, memberi pandangan bahwasanya dewan merupakan alat untuk mendapatkan informasi & sumber daya yang vital, maka dalam perspektif ini dewan komisaris dipandang dapat menaikkan nilai perusahaan yang berarti dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya akan berdampak bagi keuntungan perusahaan tersebut. Keterkaitan tersebut juga dijelaskan oleh 2 fungsi dewan yaitu service and control. Dewan komisaris sebagai bagian dari organ perusahaan memiliki fungsi dalam hal pemberian konsultasi dan nasihat pada pihak manajemen maupun direksi, ini merupakan fungsi service. Didukung juga dari pernyataan oleh Fama dan Jensen (1983) dalam Young, et al. (2001) bahwa kefasihan dari anggota atau dewan komisaris pada bidang tertentu mampu berkontribusi dalam pemberian nasihat yang berbobot yang berguna bagi penyelenggaraan suatu perusahaan serta berkontribusi pada penyusunan strategi perusahaan. Sedangkan fungsi control yang dilihat dari sudut pandang teori agensi menyatakan bahwasanya dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang mewakili mekanisme internal, dewan komisaris mengontrol kecenderungan perilaku-perilaku oportunistik yang dapat dilakukan pihak manajemen sehingga dewan komisaris dianggap mampu membantu menyalurkan atau menyetarakan kepentingan pemilik perusahaan dan manajemen Jensen (1993).

Melalui penjelasan dua fungsi dewan komisaris, tergambar bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai maupun kinerja perusahaan.

Peran dewan komisaris yang amat penting seperti yang telah paparkan sebelumnya, maka jumlah dari komisaris juga dinilai mempengaruhi perusahaan. Dibuktikan dengan hasil penelitian Dalton et al (1999) dalam Darmawati dkk (2004) yang menemukan pengaruh positif ukuran dewan terhadap kinerja pada perusahaan. Totok Dewayanto (2010) juga mengadakan penelitian serupa dengan hasil yaitu ukuran dewan komisaris memberikan dampak positif signifikan terhadap kinerja perbankan, artinya perbankan dengan jumlah dewan komisaris besar maka kinerja perbankan pun juga semakin baik. Umalomwa dan Olamide (2012) menunjukkan hasil sama yaitu adanya pengaruh positif signifikan kepemilikan manajerial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan rasio return on asset sebagai ukuran. Dari berbagai penjelasan dan uraian diatas, maka berikut hipotesis yang diajukan.

H3: Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat

Pengaruh Jumlah Direksi Terhadap Kinerja Keuangan BPR di Jawa Barat

Direksi merupakan satu dari beberapa indikator vital dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab yang besar pada keseluruhan pengelolaan perusahaan, sehingga direksi diharapkan turut andil berkontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan dan non-keuangan perusahaan. Menurut Jensen (1993) direksi mampu menjamin kinerja manajer agar sejalan dengan kepentingan dewan, maka jumlah dari direksi dianggap sebagai bagian dari struktur CG yang penting. Perspektif resource dependence pun juga mendukung jikalau jumlah direksi pada perusahaan itu besar maka perusahaan akan diuntungkan, karena kinerja perusahaan juga tergantung pada dewan perusahaan tersebut sebagai organ perusahaan yang mampu mengelola sumber daya dengan baik (Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994).

Bukti bahwa ada hubungan positif signifikan pada ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan dibuktikan oleh berbagai penelitian, diantaranya penelitian Dalton et. al. (1999). Sam'ani (2008) dan Hardikasari (2011). Berberapa pembuktian dari hasil penelitian diatas menegaskan bahwa ukuran dewan direksi adalah salah satu unsur penting dari struktur tata kelola perusahaan yang mampu menentukan hasil kinerja perusahaan. Belkhir (2008) menyatakan bertambahnya jumlah direksi juga meningkatkan ROA perbankan. Dari berbagai penjelasan dan uraian diatas, maka berikut hipotesis yang diajukan.

H4: Jumlah Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Seluruh BPR di Jawa Barat yang terdaftar pada website OJK selama tahun 2017 digunakan sebagai populasi penelitian. Purposive sampling merupakan metode yang dipakai dalam penelitian untuk mendapatkan representative sample dan diperoleh 274 sampel. Data sekunder yang digunakan yaitu laporan keuangan yang diterbitkan oleh BPR di Jawa Barat yang terdaftar di website Bank Indonesia dan OJK.

Peneliti menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Variabel dependen penelitian ini menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja keuangan BPR. ROA adalah salah satu rasio dari faktor penilaian kesehatan BPR yaitu faktor rentabilitas. Melalui rasio ROA ini, kemampuan manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan dapat diukur. Selain itu, rasio ini dapat dipakai untuk mengevaluasi kinerja manajemen, sudahkah aset yang dikelola memberi imbalan yang memadai bagi manajemen. Jika Rasio ROA makin besar, berarti perusahaanpun semakin mendapat keuntungan yang besar, dan semakin besarnya ROA maka semakin baiklah posisi perusahaan itu jika dilihat dari sisi penggunaan asetnya (Sawir, 2005:18). Rumus ROA yang digunakan yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi dengan keseluruhan aset BPR

Variabel independen menggunakan proksi dari struktur good corporate governance yaitu struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta struktur dewan yang meliputi jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi. Downes dan Goodman (1999) dalam Etty Murwaningsari (2009) memberi penjelasan mengenai kepemilikan manajerial, didefinisikan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemilik perusahaan dari pihak manajemen yang berperan aktif dalam mengambil keputusan perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen ini dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki pihak manajer dibagi dengan keseluruhan jumlah dari saham yang diterbitkan BPR.

Kepemilikan institusional adalah presentase saham milik institusi. Dalam hal ini investor institusional turut berperan aktif mengendalikan kebijakan dan keputusan manajerial dalam mengelola perusahaan. Selain struktur kepemilikan, struktur dewan digunakan sebagai variabel independen. Jumlah dewan direksi dan jumlah dewan komisaris merupakan struktur dewan yang digunakan pada penelitian ini.

Variabel kontrol penelitian ini yaitu size BPR. Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan menjadi tiga ukuran, yaitu perusahaan kecil, sedang dan besar. Ukuran bank memiliki dampak positif pada praktik tata kelola (Demsetz 1983; Levine 2004; Black et al 2006). Bank yang besar ditandai dengan kompleksitas dan perbedaan informasi yang tinggi sehingga dalam

peningkatan transparansi serta pengungkapan bank tersebut diperlukan GCG. Ukuran BPR diukur dengan log total aset BPR. Astuti (2007) menyatakan bahwasanya perusahaan dengan total atau keseluruhan jumlah aset yang besar menjadi cerminan bahwa perusahaan pada posisi mapan. Perusahaan akan mendapat lebih banyak kepercayaan dari pihak luar apabila terjadi kenaikan jumlah aset yang diikuti kenaikan dari hasil operasional (Devi Verena Sari dan A. Mulyo Haryanto, 2013)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda dengan persamaan :

$$ROA = \alpha + \beta_1 MAN + \beta_2 IN + \beta_3 KOM + \beta_4 DIR + \beta_5 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

ROA = Return On Asset

MAN = Kepemilikan manajerial

IN = Kepemilikan Institusional

KOM = Jumlah Dewan Komisaris

DIR = Jumlah Direksi

SIZE = Ukuran Perusahaan

α = konstanta

β = koefisien

ε = error Term

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa BPR di Jawa Barat pada periode 2017 memiliki rerata rasio ROA yaitu 2,8%. Angka rata-rata ROA BPR di Jawa Barat menempati peringkat 1 sesuai dengan SE (Surat Edaran) Bank Indonesia No.9/29/DPbS tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Peringkat 1 pada salah satu komponen dari faktor rentabilitas ini menunjukkan bahwa efisiensi operasi BPR di Jawa Barat sangat tinggi dan sangat stabil, kondisi BPR yang seperti ini berarti bahwa BPR mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar jika diukur dengan rasio ROA. Dalam hal ini berarti kinerja keuangan BPR di Jawa Barat yang diukur dengan rasio ROA menunjukkan kinerja BPR di Jawa Barat amat baik.

Struktur kepemilikan saham BPR, pada kepemilikan manajerial BPR di Jawa Barat rata-rata yaitu 4,2%, sedangkan rerata kepemilikan institusional yaitu 11%. Kecilnya rata-rata kepemilikan saham oleh manajemen dan intitusi dikarenakan saham BPR di Jawa Barat banyak dimiliki oleh perorangan. Sedangkan, pada struktur dewan BPR di Jawa Barat, rata-rata jumlah dewan direksi yaitu 1 orang, begitupula dengan dewan komisaris dengan jumlah rata-rata 2 orang. Hal ini mengandung arti jumlah dewan direksi dan dewan komisaris BPR di Jawa Barat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK melalui SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 yaitu masing-masing minimal 2 orang dewan. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MAN	274	0,00	0,97	0,0420	0,12828
IN	274	0,00	1,00	0,1197	0,28417
KOM	274	1	3	1,81	0,464
DIR	274	1	4	1,82	0,531
SIZE	274	6,11	9,49	7,4618	0,48099
ROA	274	-11,86	16,08	2,8723	4,22589
Valid N (listwise)	274				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistika

Pengujian Data

Penelitian ini menguji data menggunakan empat uji asumsi klasik. Pertama yaitu uji normalitas yang hasilnya nilai atau besarnya signifikansi yaitu 0,184 lebih besar dari 0,05 maka data penelitian ini lolos uji normalitas. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji autokorelasi menggunakan run test. Hasilnya, nilai asymp. Sig 0,904 lebih besar dari 0,05 maka data penelitian ini cukup random (acak) sehingga data penelitian yang diuji tidak terdapat masalah autokorelasi. Uji ketiga yaitu uji multikoleniaritas. Pada pengujian ini nilai tolerance kelima variabel kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka model regresi yang telah diuji tidak terdapat korelasi antar variabel-variabel independen, atau berarti tidak ada multikoleniaritas antar variabel independen. Uji terakhir yaitu heterokedastisitas, uji heterokedastisitas yang menggunakan spearman nilai signifikansi kelima variabel diatas 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas yang berarti bahwa model regresi penelitian baik atau dianggap model yang layak. Dari keempat uji asumsi klasik tersebut, seluruh hasilnya lolos dan dapat diambil kesimpulan bahwa data layak untuk diuji.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji F pada persamaan regresi yaitu secara simultan struktur good corporate governance yang diproksikan dengan struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional serta struktur dewan yaitu jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi serta variabel kontrol ukuran BPR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPR yang diukur dengan rasio ROA. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansinya, nilai menunjukkan angka kurang dari 0,05. Nilai signifikansi ini membuktikan bahwasanya struktur good corporate governance mempengaruhi BPR di Jawa Barat dalam mengelola aktiva dalam menghasilkan laba sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangannya. Secara parsial pengaruh struktur GCG terhadap kinerja keuangan BPR disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-7,301	4,088		-1,786	0,075
MAN	-1,991	1,968	-0,060	-1,011	0,313
IN	0,044	0,900	0,003	0,049	0,961
KOM	0,392	0,566	0,043	0,694	0,489
DIR	1,537	0,534	0,193	2,881	0,004
SIZE	0,904	0,608	0,103	1,488	0,138

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel, berikut adalah penjabaran hipotesis pada penelitian ini :

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat

Berdasar hasil penelitian yang tersaji pada tabel, diketahui nilai signifikansi MAN(Kepemilikan Manajerial) 0,313 lebih besar dari 0,05, artinya kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian Wiranata dan Nugrahanti (2013) sejalan dengan hasil ini, yaitu terbukti bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ROA. Hartono dan Nugrahanti (2014) juga melakukan penelitian yang serupa dengan hasil yang sama yaitu bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan

manajerial terhadap kinerja keuangan perbankan. Hasil-hasil ini mendukung pula penelitian Christiawan dan Tarigan (2007), Bayrakdaroglu et al. (2012), Rustendi dan Jimmy (2008), Permanasari (2010) bahwa kepemilikan saham oleh manajemen tidak mempengaruhi kinerja.

Hasil yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi kinerja keuangan BPR di Jawa Barat yang diukur menggunakan ROA hal ini dikarenakan rendahnya jumlah BPR di Jawa Barat yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki manajemen. Saham BPR di Jawa Barat kepemilikannya didominasi oleh perorangan. Jumlah BPR di Jawa Barat tahun 2017 yang sahamnya terdapat kepemilikan oleh manajemen hanya 58 dari 274 BPR yang berarti jumlahnya hanya sekitar 21%. Pada 58

BPR yang sahamnya terdapat kepemilikan manajerial ini, proporsi saham yang dimiliki manajemen tiap BPR rata-rata hanya kurang dari 25% karena menurut Pasal 6 Ayat (2) Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 anggota direksi (manajemen) dilarang memiliki saham sebesar 25%. Kepemilikan manajerial pada BPR di Jawa Barat yang rendah ini (jumlah maupun proporsi) menjadi alasan bahwa kepemilikan manajerial tidak mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja BPR melalui pengelolaan aktiva yang efektif guna memperoleh laba. Dalam hal ini ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan kepemilikan saham oleh pihak manajemen pada BPR di Jawa Barat guna membantu penyatuan kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham) dengan maksud memotivasi manajer agar meningkatkan kinerja BPR belum dapat bekerja secara efektif.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan variabel IN (Kepemilikan Institusional) besarnya nilai ignifikansi yaitu 0,961 lebih dari 0,05. besarnya nilai signifikansi variabel IN mengandung arti bahwa tidak adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat (ROA). Maka dari itu, H2 ditolak. Wiranata dan Nugrahanti (2013) hasil penelitiannya juga membuktikan tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap rasio ROA. Wulandari (2006) dan Hapsoro (2008) serta Sabrina (2101) hasil dalam penelitiannya pun membuktikan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Begitu pula hasil penelitian yang serupa ditemukan pada penelitian Kartikasari dan Setiawan (2008) yang membuktikan tidak adanya pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris terhadap laba perusahaan.

Dilihat dari hasil pengolahan data pada penelitian ini, ditemui bahwa karakteristik BPR di Jawa Barat dalam hal kepemilikan saham oleh lembaga institusi

yaitu rendah. Hal tersebut dibuktikan dari 274 jumlah BPR di Jawa Barat yang menjadi sampel pada penelitian ini, hanya ada 20% yang sahamnya terdapat kepemilikan intitusional yaitu 56 BPR. Kecilnya jumlah BPR yang sahamnya terdapat kepemilikan institusional mengakibatkan kepemilikan institusional tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk menunjang kinerja BPR di Jawa Barat melalui proses monitoring terhadap tindakan manajer dalam meningkatkan kinerja keuangan BPR.

H3: Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat

Hasil menunjukkan nilai signifikansi variabel KOM (Jumlah Dewan Komisaris) 0,489 lebih dari 0,05 nilai ini berarti jumlah dewan direksi tidak berdampak atau tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat yang diukur dengan ROA. Dengan demikian, H3 ditolak. Sejalan dengan penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010) serta Purno (2013) yang hasil penelitiannya memberikan bukti dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Tidak adanya pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA BPR dikarenakan jumlah dewan komisaris pada BPR di Jawa Barat yang rata-rata berjumlah 2 orang tersebut hanya sebagai pemenuhan persyaratan terhadap Pasal 24 Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 serta Pasal 6 PBI nomor 8/26/PBI/2006. Hal tersebut menyebabkan banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris tidak cukup memberi kontribusi terhadap kinerja keuangan (ROA) BPR. Padahal, fungsi dewan komisaris BPR amat penting diantaranya dalam peran pengawasannya atas kebijakan-kebijakan dan pengawasan terhadap jalannya operasional BPR serta dalam hal pemberi nasihat kepada direksi sesuai dengan UU PT No. 40 tahun 2007. Selain itu, kedudukan direksi yang amat kuat juga dapat menjadi alasan tidak berpengaruhnya jumlah dewan komisaris sehingga adanya dewan komisaris tidak cukup memberi efek yang signifikan terhadap kinerja BPR (Arief, 2009).

H4: Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPR di Jawa Barat

Sesuai hasil yang telah dipaparkan pada tabel, nilai signifikansi variabel DIR (jumlah dewan direksi) yaitu $0,004 < 0,05$ dan nilai Beta positif, sehingga diketahui bahwasanya variabel DIR (jumlah dewan direksi) mempengaruhi kinerja keuangan BPR di Jawa Barat secara positif dan signifikan. Maka disimpulkan H1 diterima. Penelitian ini hasilnya sama dengan hasil dari beberapa penelitian yang sudah ada, antara lain oleh Amran (2011) yang memberikan kesimpulan bahwa perusahaan

dengan ukuran dewan direksi yang besar lebih unggul dibanding dengan perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang lebih kecil, yang berarti banyaknya jumlah direksi memberi efek positif terhadap profitabilitas perusahaan karena mampu menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien. Sama halnya penelitian Belkhir (2008) yang membuktikan adanya peningkatan jumlah anggota direksi mampu menaikkan rasio ROA (return on asset) pada perusahaan perbankan. Begitu pula penelitian oleh Dalton et al. (1999) yang sama halnya membuktikan ukuran dewan berpengaruh positif signifikan dengan kinerja perusahaan.

Hasil pada penelitian ini yang membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan jumlah anggota direksi terhadap kinerja keuangan (ROA) BPR di Jawa Barat dikarenakan jumlah dewan direksi pada BPR tidak hanya memenuhi aturan sesuai dengan pasal 4 POJK Nomor 4/POJK.03/2015, namun fungsi dari sejumlah dewan direksi itupun juga mampu menjalankan fungsinya sesuai UU No 40 tahun 2007. Jika dihubungkan dengan teori agensi, dalam hal ini dewan direksi (agen) BPR dinilai mampu menjalankan tugas-tugasnya, diantaranya yaitu kemampuannya menetapkan arah kebijakan serta membuat strategi sumber daya jangka pendek maupun strategi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan disertai dengan kemampuannya dalam memastikan keseimbangan kepentingan dari keseluruhan pihak-pihak yaitu pihak agen dan pihak prinsipal, serta mampu memastikan bahwa aktivitas perseroan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Pada penjelasan diatas dapat diambil pengertian bahwa jumlah BPR di Jawa Barat mampu meningkatkan kinerja keuangannya yang diukur dengan rasio ROA.

Arah positif pada hasil analisis regresi penelitian ini membuktikan bahwa meningkatnya kinerja keuangan BPR sejalan dengan meningkatnya jumlah direksi. Besarnya jumlah dewan yang dinilai menguntungkan ini sesuai dengan sudut pandang resources dependence. Resources dependence merupakan suatu pandangan bahwa dewan dalam suatu perusahaan amat penting perannya dalam pengelolaan perusahaan sehingga perusahaan akan banyak bergantung pada dewannya dalam hal pengelolaan sumber daya. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) menerangkan bahwasanya didalam perusahaan dengan kebutuhan hubungan eksternal yang semakin besar, maka juga kebutuhan perusahaan akan dewan juga semakin tinggi.

Pada penelitian ini, ukuran BPR digunakan sebagai variabel kontrol, terlihat pada tabel bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 ini menunjukkan ukuran BPR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA sebagai ukuran kinerja BPR. Hasil tersebut berarti semakin besarnya ukuran BPR tidak diikuti dengan besarnya perubahan ROA. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa besarnya ukuran BPR di Jawa Barat tidak sejalan pada besarnya kemampuan BPR menggunakan seluruh aset

yang dimiliki dalam menghasilkan laba untuk meningkatkan kinerja BPR. Penelitian Nursatyani, Wahyudi, dan Syaichu (2014) memiliki kesimpulan yang sama yaitu bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi ROA. Penelitian ini menolak temuan Panjaitan et al., (2004:42) yang menyatakan bahwa kecilnya skala perusahaan memiliki kecenderungan bahwa perusahaan tersebut akan kurang menguntungkan dibandingkan perusahaan skala besar (Panjaitan et al., 2004: 42)

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini yaitu pengaruh struktur good corporate governance terhadap kinerja BPR di Jawa Barat tahun 2017, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya struktur GCG yang diproksikan dengan struktur kepemilikan saham manajerial dan institusional serta jumlah dewan komisaris dan jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap ROA yang merupakan ukuran kinerja BPR di Jawa Barat. Secara parsial ditemukan bahwa hasilnya adalah jumlah dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja BPR di Jawa Barat yang diukur dengan ROA, namun variabel lainnya yang terdiri dari jumlah dewan komisaris, kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPR.

Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa BPR di Jawa Barat memiliki karakter bahwa meningkatnya jumlah anggota direksi hingga pada titik optimal yang sesuai dengan aturan yaitu pada pasal 4 POJK Nomor 4/POJK.03/2015, mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja (ROA). Kesimpulan pada hasil penelitian ini menekankan bahwa begitu kuatnya kedudukan direksi dalam mengelola BPR di Jawa Barat sehingga mampu memberi efek pada kinerja BPR tersebut. Dapat dimaknai juga bahwa peran anggota direksi mampu memperlemah konflik agensi pada BPR yang dapat menurunkan kinerja BPR.

Saran

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu variabel-variabel penelitian yang digunakan tidak memiliki kontribusinya yang cukup besar dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel kinerja keuangan BPR, maka pada penelitian mendatang, peneliti sebaiknya menggunakan variabel lainnya yang lebih mampu memberi kontribusi pengaruh yang besar terhadap variabel kinerja keuangan BPR. Keterbatasan yang lain yaitu penelitian ini hanya menggunakan satu rasio yaitu rasio ROA sebagai ukuran kinerja BPR, yang berarti dalam penelitian ini kinerja keuangan BPR hanya dilihat dari salah satu faktor rentabilitasnya saja, sehingga diharapkan oleh peneliti, penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan ukuran yang lebih luas untuk mengukur kinerja keuangan BPR. Penelitian ini hanya menggunakan sampel

BPR di Jawa Barat, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada BPR diseluruh Indonesia karena setiap provinsi dimungkinkan memiliki karakter yang berbeda beda, sehingga peneliti menyarankan bahwa penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel pada provinsi lain terlebih yang belum pernah diteliti

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. Management Control System, Edisi 11, penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Penerbit Salemba Empat, Buku 2, Jakarta.
- Avelia, Y. (2015). PENGARUH INSTITUTIONAL OWNERSHIP TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE MELALUI INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN RETAIL DAN JASA DI INDONESIA, 589–598.
- Bayrakdaroglu, Ali. et al. 2012. Is There A Relationship Between Corporate Governance and Value-Based Financial Performance Measures? A Study of Turkey as An Emerging Market. *Asia-Pasific Journal of Financial Studies* (2012) 41, 224-239.
- Bugshan, Turki, 2005, Corporate Governance, Earing Management and the Information Content of Accounting Earnings, Theoretical Model and Empirical Tests, A Dissertation, Bond University Quensland, Australia
- Bukhori, Iqbal dan Raharja. 2012. Pengaruh God Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* . pp. 1-12.
- Chaganti, R. dan Damanpour, F., 1991, “Institutional Ownership, Capital Structure, Clarke. 2004. Theories of Corporate Governance: The Philosophical Foundations of Corporate Governance. Sydney: Routledge Taylor & Francis Group.
- Dalton, et al.. 1999. Number of Directors and Financial Performance: A Meta Analysis. *Academy of Management Journal*, Vol 42. Hal 674-686.
- Dewayanto, T. (2008). Governance Terhadap Kinerja Perbankan Nasional Studi pada Perusahaan Perbankan yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008. *Fokus Ekonomi*, 5(2), 104–123.
- Downes, J. & Goodman, J.E., 1999. Kamus Istilah Akuntansi, Jakarta: Elex Media Komputindo. Beck, T., Levine, R., 2004. ‘Stock markets, banks, and growth: panel Komputindo. Beck, T., Levine, R., 2004. ‘Stock markets, banks, and growth: panel evidence’. *Journal of Banking and Finance* 28, 423–442.
- Hapsoro, Dody. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 19, No. 3, Desember 2008.
- Hartono, D. F., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pngaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 191–205.
- Hoetker, G. dan Mellewigt, T. (2009), “Choice and performance of governance mechanisms: matching alliance governance to asset type”, *Strategic Management Journal*, Vol. 30 No. 1, pp. 1025-44.
- James C, Van horne & Jhon M. wachowicz, JR. 2005. Fundamental of Financial

- Management/Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Edisi Kedua belas). Jakarta:Salemba Empat.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. "Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure." *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Jensen, MC. 1993. The Modern Industrial Revolution, Exit and The Failure of Internal Control System. *The Jurnal of Finance*.
- Karmozdi, Mehrdad and Hadi Karmozdi. 2013. An Analysis of the Effect of Managerial Ownership on Financial Policies and the Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. *World Applied Sciennces Journal*, 27 (10), pp: 1312 –1317.
- Lukviarman, Niki. 2016. *Corporate Governance : Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Muktiyanto, A. (2011). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia PENGARUH INTERDEPENDENSI MEKANISME CORPORATE*. Pengaruh Interdenpensi Mekanisme Coprorate Governance Terhadap Kinerja Perbankan, 8(2), 197–213.
- Muktiyanto, A. (2011). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia PENGARUH INTERDEPENDENSI MEKANISME CORPORATE*. Pengaruh Interdenpensi Mekanisme Coprorate Governance Terhadap Kinerja Perbankan, 8(2), 197–213.
- Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol. 3. No. 2. pp. 189-215.
- Sam'ani. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004 – 2007. Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Smith, M.P. 1996. "Shareholder Activism by Institutional Investors: Evidence from CalPERS". *Journal of Finance*, 51: 227-252.
- Tricker, B. 2009. *Corporate Governance; Principles, Policies, and Practices*. New York: Oxford University Press.
- Ujiyantho dan Pramuka, 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur), *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- Umalomwa U, & Olamide O. (2012). An Empirical of the Relationship between Ownership Structure and the Performance of Firms in Nigeria. *International Business Research*, 5(1).
- Verena, Devi Sari dan A. Mulyo Haryanto. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Jurnal Manajemen*, 2 (3), pp: 1-11.
- Wardhani, R. (2007). Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4, 95–114. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.05>

- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 15-26.
- Wulandari. 2006. *Karakteristik Good Corporate Governance*. Alfabeta. Bandung